

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agustina, Rosa, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Goenawan, Kian, 2008, *Panduan Mengurus Izin Tanah & Properti*, Cet. I, Pustaka Grhatama, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan kedelapan, Liberty, Yogyakarta.
- Mustofa, 2010, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, KaryaMedia, Yogyakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CSDBI, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Santoso, Urip, 2014, *Hukum Perumahan*, cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.
- Setya Pratiwi, Cekli, dkk, 2016, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*, Judicial Sector Support Program, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Kencana, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Artikel/Tesis-Disertasi**

Arum, Elok Puspa, “Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Berkas Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapannya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Rahmayanti, Erni, “Analisis Yuridis Tentang Akta Jual Beli (AJB) Tanah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Memuat Nilai Transaksi Lebih Rendah Dari Yang Sebenarnya”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.

Yubaidi, Ricco Survival, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Dan Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Akta Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor3/Pdt.G/2015/PN.Btl).”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

#### **D. Internet:**

Bobby Agung Prasetyo, “*AJB: Cara Pembuatan Dan Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi*”, <https://www.99.co/blog/indonesia/ajb/>, diakses pada pukul 13.35 WIB tanggal 4 April 2019.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/cermat> diakses pada pukul 22.45 WIB, tanggal 3 September 2019.